



LEMHANNAS RI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 100, November 2017



Susi Pudjiastuti Paparkan Kinerja

Tiga Tahun Menjabat sebagai Menteri kepada Peserta PPSA XXI (hal 11)

- 2** Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 3** Upacara Penutupan PPRA LVI
- 4** Penutupan *Audit Surveillance* di Lemhannas RI
- 5** UKP-PIP Lakukan Audiensi kepada Gubernur Lemhannas RI
- 6** *Deputy (policy) Singapore Ministry of Defence* berikan Kuliah Umum
- 7** Komisi I DPR RI Tetapkan Pagu Anggaran Lemhannas RI 2018
- 7** Lemhannas RI Peringati Hari Pahlawan
- 8** Peserta PPSA XXI Laporkan Hasil SSDN di Tiga Provinsi
- 8** Tenaga Kependidikan dan Dosen UNS Surakarta Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
- 9** PPSA XXI Terima Kuliah Umum Pengelolaan Keuangan Negara dari Ketua BPK RI
- 10** PPSA XXI Bahas Pentingnya Pancasila dalam Sistem Pendidikan

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah



Sebanyak 116 orang anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama tujuh hari yakni dari tanggal 2-8 Oktober 2017. Kegiatan ini diselenggarakan guna menambah wawasan bagi para anggota IPPAT.

Berbicara mengenai peran, PPAT bertugas untuk membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

PPAT merupakan bagian integral dan langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama peranannya dalam mewujudkan tujuan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Idealnya, seorang anggota PPAT di masyarakat harus mampu menjadi agen perubahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah-tengah masyarakat serta mampu mendorong masyarakat itu sendiri agar mengedepankan tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan menjadi relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam upacara pembukaan yang diselenggarakan pada Senin (2/10) pagi di Gedung Trigatra Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan

sambutan di depan para peserta kegiatan. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi wadah sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Nilai-nilai kebangsaan telah menjadi faktor pendorong dan memotivasi tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang ditandai dengan bersatunya PPAT di wilayah nusantara. Betapa pentingnya peran PPAT di dalam pembangunan nasional, misalnya terkait dengan perbankan, lembaga pembiayaan, membuat akta jual beli, dan akta jaminan harga tanggungan. Di satu sisi, dalam menjalankan tugasnya, PPAT mendapatkan hambatan persoalan hukum, karena saat ini PPAT tidak hanya berhubungan langsung dengan BPR saja tetapi dengan Dirjen Pajak, Pemda, Kepolisian, Jaksa, KPK, PPATK, dan Hakim beserta instansi lainnya.” jelas Agus Widjojo.

Wadah ini, lanjut Agus, sangat strategis dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai bangsa yang dipersatukan karena kemajemukannya, nilai-nilai kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.

Kemajemukan dan keragaman, menurut Agus, merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam kehidupan bangsa. Namun di sisi lain mengandung potensi konflik, yang bila tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ●

Upacara Penutupan PPRA LVI

Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi telah menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI yang diikuti oleh 114 peserta dari berbagai instansi di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai II Lemhannas RI pada Kamis (28/9).

Pada acara penutupan tersebut, Plt. Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto melaporkan bahwa 114 peserta dinyatakan lulus.

“Program pendidikan telah berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil sidang Dewan Penilai yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI pada tanggal 25 September 2017, telah memutuskan dan menetapkan bahwa 114 orang peserta PPRA LVI dinyatakan lulus dan menerima ijazah. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya mendapatkan predikat terbaik yaitu 1 orang peserta predikat akademik terbaik, 1 orang predikat taskap (Kertas Karya Perseorangan -red) terbaik, dan 1 orang lulusan terbaik peserta negara sahabat,” lapor Karsiyanto.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa peserta PPRA telah menjalani proses belajar yang intens, mendalami, dan menerapkan rangkaian proses panjang yang bertujuan untuk memberikan bekal dan menguatkan terhadap pemahaman tentang bidang studi inti. Bidang studi tersebut meliputi Pancasila dan UUD NRI 1945, Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan Kepemimpinan Nasional. Para peserta juga mempelajari bidang studi lainnya untuk menambah wawasan pengetahuan para peserta dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan solusi terhadap persoalan aspek ketahanan nasional sesuai metodologi yang diajarkan.

Perkembangan lingkungan strategis global baik internasional, regional maupun nasional beserta dampaknya, merupakan fenomena global yang harus disikapi secara tepat, cerdas, dan

bijak oleh setiap warga negara utamanya oleh pemimpin nasional. Untuk itu, Agus Widjojo menekankan kepada peserta sebagai calon pemimpin nasional, untuk memahami betul tentang geopolitik dan geostrategi.

“Oleh karena saudara akan menjadi calon pemimpin nasional, harus paham betul geopolitik dan geostrategi negara masing-masing. Salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian serius kita adalah saat ini kondisi sosial masyarakat di mana sikap intoleran yang semakin mencemaskan, diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menyebarkan berita-berita kebohongan dan mengajak aliran radikalisme, terorisme, dan intoleransi terhadap perbedaan. Apabila kondisi tersebut tidak dicegah akan dapat melemahkan kondisi ketahanan nasional,” jelas Agus Widjojo.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga memberikan penghargaan kepada peserta dengan predikat akademik terbaik kepada Ruslaini, S.E., M.M., predikat taskap terbaik kepada Kombes Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dan predikat lulusan terbaik peserta negara sahabat diraih oleh peserta yang berasal dari Singapura ME 7 Gan Chee Weng Melvin.

Penutupan PPRA LVI ini ditandai dengan penanggalan tanda peserta dan penyematan pin alumni kepada perwakilan peserta oleh Gubernur Lemhannas RI. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengukuhan alumni PPRA LVI sebagai pengurus IKAL (Ikatan Alumni) Lemhannas RI masa bakti 2017-2022.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito para Deputy, Pejabat Struktural Lemhannas RI, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, Ketua Perista, dan tamu undangan lainnya. ●

Penutupan *Audit Surveillance* di Lemhannas RI



Audit *Surveillance* di Lemhannas RI yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 2-3 Oktober 2017 resmi ditutup dengan Rapat yang dipimpin oleh Drs. Sukendra Martha, M.Sc, M.App.Sc. selaku perwakilan manajemen, di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI (3/10).

Dalam penutupan tersebut, Sukendra mengatakan bahwa audit ini bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Lemhannas RI dalam mempertahankan ISO 9001 : 2015.

Satrio Budiawan selaku salah satu auditor eksternal dari *British Standards Institution* menyampaikan hasil audit tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya penemuan yang bersifat ketidaksesuaian sehingga Lemhannas RI dapat mempertahankan Sertifikat ISO 9001 : 2015.

Namun, lanjut Satrio, masih terdapat tiga peluang perbaikan di Lemhannas RI. Peluang perbaikan pertama adalah Sasaran Mutu pada Kedeputan Pengkajian.

Peluang perbaikan kedua yaitu isu terkait efisiensi anggaran yang berdampak (berisiko) pada realisasi jumlah tema kajian strategis yang harus diselesaikan belum dibahas saat rapat tinjauan manajemen (20/9).

Peluang perbaikan yang ketiga, lanjut Satrio, adalah sasaran mutu organisasi yang saat diturunkan kepada tiga kedeputan bukanlah hal rutinitas program kegiatan seperti penyusunan bahan ajar atau membuat laporan keuangan, namun merupakan suatu proses yang tidak terkait dengan pelayanan untuk menjadi *World Class Institution*.

Penutupan rapat audit tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut dan ditutup dengan makan siang bersama. Hadir dalam penutupan *audit surveillance* tersebut adalah Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Immanuel, Kepala Biro Humas Brigjen TNI Mindarto, Plh. Kepala Biro Kerjasama Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu serta sejumlah pejabat struktural Lemhannas RI. ●

“

Audit ini bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Lemhannas RI dalam mempertahankan ISO 9001 : 2015.



UKP-PIP Lakukan Audiensi kepada Gubernur Lemhannas RI

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melakukan audiensi kepada Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito pada Jumat (6/10) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I Lemhannas RI.

Deputi Pengendalian dan Evaluasi UKP-PIP Silverius Yoseph Soeharso menyampaikan bahwa pihaknya memiliki keinginan untuk menyinergikan UKP-PIP dengan Lemhannas RI. “Berkontribusi dengan salah satu tugas pokok UKP PIP diminta untuk menyusun sebuah indeks aktualisasi pancasila untuk seluruh aparatur negara baik kota atau kabupaten maupun kementerian. Kami sudah menyusun sedikit konsep namun karena kami mengetahui bahwa di Lemhannas ada Labkurtannas, mungkinkah dari indeks ketahanan nasional itu kita bisa adaptasi atau *synchronizing* untuk in-

deks aktualisasi Pancasila,” ungkap Silverius.

Selain itu, Silverius juga menyampaikan mengenai *Training of Trainers* terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Melihat kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI, Silverius merasa materi-materi yang disampaikan bisa disinergikan khususnya dalam hal Pancasila. Poin terakhir yang disampaikan adalah mengenai pelatihan kaderkader inti Pancasila.

Sementara itu, Kepala UKP-PIP Yudi Latief menambahkan bahwa Pancasila kini telah menjadi indikator dalam pembangunan nasional. “Pancasila menjadi indikator pembangunan nasional kita. Saya kira Lemhannas dan Labkurtannas telah menjangkau itu,” ungkap Yudi.

Agus Widjojo sendiri menanggapi bahwa perlu adanya diskusi lebih lanjut dan mendalam mengenai pengukuran berikut indikator-indikatornya. Selain itu, diperlukan persiapan lebih matang terkait dengan konsep *masterplan* dari UKP-PIP sendiri. Selanjutnya, audiensi dilanjutkan dengan diskusi mendalam mengenai bentuk kerja sama antara Lemhannas dengan UKP-PIP. ●

“

Pancasila menjadi indikator pembangunan nasional kita. Saya kira Lemhannas dan Labkurtannas telah menjangkau itu

- Yudi -

Deputy (policy) Singapore Ministry of Defence Berikan Kuliah Umum di Lemhannas RI



Mr. Keith Tan, Deputy (policy) Singapore Ministry of Defence (MINDEF) memberikan kuliah umum kepada jajaran Lemhannas RI dan para peserta PPSA XXI di Auditorium Gajah Mada pada Rabu (04/10).

Kuliah umum diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus Widjojo mengatakan bahwa kedatangan Mr. Keith merupakan tanda hubungan baik antara kedua negara Indonesia-Singapura dalam bidang pendidikan dan hubungan bilateral.

Singapura, menurut Agus Widjojo, adalah tetangga baik Indonesia yang memiliki aspek kesamaan dalam masyarakat, sosial dan budaya serta beberapa isu terkait ancaman keamanan yang dihadapi saat ini. Dengan kedatangan Wakil Menteri Pertahanan Bagian Kebijakan diharapkan dapat memberikan wawasan terkait hubungan bilateral pertahanan Indonesia-Singapura.

Dalam kesempatannya, Mr. Keith menyampaikan bahwa MINDEF dan Angkatan Bersenjata Singapura (*Singapore Armed Forces/SAF*), memiliki hubungan yang penting dengan Lemhannas RI. Sejak tahun 2009, perwira tinggi SAF mulai mengikuti kursus PPRS Lemhannas setiap tahun. Para alumni Lemhannas dari SAF melaporkan bahwa kurikulum yang disampaikan lengkap dan sangat bermanfaat.

Mr. Keith sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para peserta atas pengetahuan terkait dengan perkembangan global, regional maupun lokal. Hubungan pertahanan bilateral Indonesia dan Singapura terjalin erat dan kuat. Hal tersebut dapat dilihat dengan berlangsungnya kegiatan *flypast* bersama pada

September lalu dalam perayaan hubungan diplomatik ke-50 tahun antara Indonesia dan Singapura.

Mr. Keith juga menyampaikan bahwa berdasarkan kerja sama yang telah terjalin baik antara kedua belah pihak dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan wilayah dari segala upaya ancaman, Singapura dan Indonesia harus meningkatkan efektivitas kerja bersama untuk menghadapi ancaman baru dan bersifat non-konvensional, seperti terorisme.

Keith berharap Indonesia dan Singapura akan menemukan kesempatan baru untuk memperkuat ASEAN. "Kita merayakan ulang tahun ke-50 ASEAN pada tahun ini, dan prestasi ASEAN memang banyak sejak terbentuknya pada tahun 1967. Pada zaman ini, ASEAN menghadapi berbagai tantangan, misalnya Laut China Selatan, atau penanggulangan bencana alam dan krisis kemanusiaan, atau pertumbuhan kegiatan teroris di wilayah kita. Permasalahan tersebut tidak dapat diatasi suatu negara di ASEAN sendiri. Diharapkan Indonesia dan Singapura dapat berkerja sama untuk mendapatkan solusi yang bersifat ASEAN-centric, sehingga dapat membantu ASEAN mencapai visinya untuk menjadi wilayah yang dinamis dan terbuka," jelas Mr. Keith.

Secara pribadi, Mr. Keith merasa sangat optimis terhadap masa depan Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, ekonomi yang kuat, kaum buruh yang berpendidikan, serta sistem demokrasi yang berkembang dengan baik. Selama 20 tahun ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan perkembangan terbaik di Asia, dan merupakan suatu "keajaiban Asia". Mr Keith juga berharap dapat memperdalam kemitraan khusus antara kedua negara demi generasi masa depan. ●

Komisi I DPR RI Tetapkan Pagu Anggaran Lemhannas RI 2018



Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dengan Komisi I DPR RI Senin (4/9) lalu, diselenggarakan RDP RKA-K/L lanjutan yang diikuti oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) Senin (16/10) pagi di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI. RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, S.E., M.M. membahas kesimpulan hasil Pagu Anggaran dari ketiga institusi terkait, yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Badan Anggaran DPR RI.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan rencana kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2018, didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyuni. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017, ditetapkan pagu alokasi anggaran Lemhannas RI sebesar Rp277,7 Miliar.

Anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam program kerja Lemhannas RI yang terdiri dari Program Pengembangan Ketahanan Nasional, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Berdasarkan pemaparan pagu oleh Gubernur Lemhannas RI, dari total alokasi anggaran sebesar Rp277,7 Miliar, sebanyak Rp99,7 Miliar akan digunakan untuk Program Pengembangan Ketahanan Nasional yang terbagi dalam tiga kedeputian yakni Kedeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik termasuk untuk mendukung Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Selain Lemhannas RI, pada pagu alokasi anggaran Wantannas dan Bakamla juga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan anggaran tahun 2018. Di akhir rapat, Hasanuddin menyampaikan agar ketiga institusi mampu mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi dalam menggunakan anggaran belanja negara, "Komisi I DPR RI mendesak Lemhannas, Wantannas dan Bakamla agar dalam penggunaan anggaran tahun anggaran 2018 senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," tegas Hasanuddin. ●



Lemhannas RI Peringati Hari Pahlawan

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur, Lemhannas RI pada Jumat (10/11) memperingati Hari Pahlawan 10 November dengan melaksanakan upacara di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh personel Lemhannas dengan khidmat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Agus Widjojo, disampaikan bahwa Hari Pahlawan yang saat ini sedang diperingati berawal dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa tersebut memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa segenap bangsa Indonesia dari berbagai ras, suku, agama, dan budaya bersatu untuk berikrar, bergerak, dan menyerahkan hidup dan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pelajaran yang dapat diambil dari tiap perjuangan para pahlawan dalam membentuk keindonesiaan adalah api perjuangan yang mewujudkan terbangunnya persatuan Indonesia yang terdiri dari dua hal yaitu harapan dan pengorbanan, yang menghasilkan persatuan dan melahirkan Indonesia, merawat eksistensinya dalam panggung sejarah bangsa-bangsa, dan harus terus dinyalakan agar Republik Indonesia tetap berdiri tegak, menjadi besar dan terus memberi sumbangan penting sebagai bagian dari persaudaraan umat manusia di dunia.

Selain itu, peristiwa pertempuran 10 November, juga terinspirasi dari R.A Kartini, Ikrar Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, keberanian dari Kwee Kek Beng dalam melakukan kritik sosial, komitmen dari Johannes Leimena tentang semangat ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, dan syair *Yaa Ahlal Wathan* menggerakkan ruh pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karya cipta estetik-heroik tersebut membangkitkan semangat arek-arek Suroboyo untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu.

Untuk itu, Agus Widjojo mengajak seluruh peserta upacara untuk terus berjuang, bekerja, dan berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat maupun negeri ini. ●

Peserta PPSA XXI

Laporkan Hasil SSDN di Tiga Provinsi



Usai melaksanakan Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) pada pekan lalu (9-12 Oktober 2017), peserta PPSA (Program Pendidikan Singkat Angkatan) XXI Selasa (17/10) melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lemhannas RI di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai III Lemhannas RI. SSDN tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok dengan tujuan studi tiga provinsi yang berbeda untuk setiap kelompok yaitu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Maluku.

Acara diawali dengan laporan dari Plt. Deputy Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto yang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan SSDN, yaitu untuk membekali para peserta agar memiliki cakrawala berpikir lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif dari daerah ataupun provinsi

yang dikunjungi, mempertajam kemampuan dalam menemukan isu-isu strategis di daerah, dan menemukan akar permasalahannya serta menganalisis dan mencari solusinya.

Laporan SSDN pertama disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Laksda TNI Agung Pramono, S.H, M. Hum. Agung menyampaikan bahwa kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Laporan kedua disampaikan oleh kelompok tujuan SSDN Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Marsda TNI Yoyok Yekti Setiono. Kemudian laporan terakhir dipaparkan oleh kelompok SSDN tujuan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Dr. H. Darma Kusuma. Pada pemaparan laporan SSDN tersebut terdapat diskusi, tanya jawab dan ulasan dari Tenaga Ahli masing-masing kelompok.

Dalam sambutannya yang sekaligus menjadi penutup kegiatan ini, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI telah tercapai.

“Saya yakin dengan penjelasan dan paparan laporan dari masing-masing kelompok tujuan SSDN tadi dengan menampilkan data, fakta, dan rekomendasi menunjukkan bahwa tujuan dari salah satu kegiatan SSDN PPSA XXI 2017 Lemhannas RI telah dicapai,” ujar Agus.

Melalui kegiatan SSDN, lanjut Agus, peserta telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk memajukan proses pembangunan di daerah. Selain itu, peserta juga telah berkontribusi kepada lembaga khususnya dalam memvalidasi data pengukuran ketahanan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, M.P., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., para Deputy, Tenaga Pengkaji dan Pengajar, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI. ●



Tenaga Kependidikan dan Dosen UNS Surakarta Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Menjadi salah satu dari sepuluh Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) haruslah memiliki tenaga pengajar dan dosen profesional yang berperan penting dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sebagai wujud pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan dan dosen dalam mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan menindaklanjuti proses belajar mengajar di kampus kepada mahasiswa, UNS mengirimkan 70 orang tenaga pendidiknya. Tenaga kependidikan tersebut terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Wakil Dekan,

Wakil Direktur, Biro, Kepala Bagian, Kasubbag, Lektor, Kaprodi, Guru Besar, dan Dosen untuk mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lemhannas RI.

Kegiatan yang berlangsung selama seminggu, dari tanggal 17 hingga 20 Oktober 2017 ini, mengangkat tema 'Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara'. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang dalam sambutannya menyampaikan rasa hormatnya kepada para peserta pelatihan yang diikuti oleh pimpinan-pimpinan UNS.

"Suatu kehormatan bagi Lemhannas RI dapat berbagi dan memberikan pencerahan terkait pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Saya ingin

mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri, terhadap wawasan kebangsaan kita semua, guna merefleksikan pentingnya nilai-nilai luhur yang kita miliki, agar dapat kita jaga bersama," terang Agus Widjojo.

Hadir pula sebagai peserta, Rektor UNS, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. yang turut memberikan sambutannya di awal pembukaan. Ravik Karsidi berharap agar pelatihan ini mampu membawa UNS ke arah yang lebih baik lagi. "Kita harapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin UNS dimasa yang akan datang. Untuk itu, UNS pada tahun 2030 mencanangkan visinya menjadi perguruan tinggi yang mendapat status sebagai *world class university*, dan saat ini UNS sudah masuk ke dalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia," jelas Ravik Karsidi. ●



PPSA XXI Terima Kuliah Umum Pengelolaan Keuangan Negara dari Ketua BPK RI

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA. memberikan kuliah umum kepada peserta PPSA XXI dan personel Lemhannas RI. Kuliah umum yang dimoderatori oleh Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Immanuel Larosa berlangsung di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Kamis (19/10).

Sebelum kuliah umum dimulai, kegiatan diawali dengan sambutan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa tujuan dari kuliah umum tersebut adalah untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memahami tugas fungsi dan kewenangan BPK RI.

"Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam mengelola keuangan negara harus dilakukan secara tertib dan akuntabel," terang Agus Widjojo.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, lanjut Agus Widjojo, memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga

pemerintah non kementerian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun mendapatkan anggaran dari APBN, memandang perlu dan sangat penting untuk mendapatkan pencerahan dari ketua BPK RI tentang pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Dalam kuliah umumnya, Moermahadi Soerja memperkenalkan tentang BPK RI dari struktur organisasi hingga tugas pokok dan fungsinya. Moermahadi menyampaikan bahwa BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK RI bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Dalam Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa BPK RI dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/ Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, Yayasan dan Lembaga atau Badan Lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. BPK RI juga memiliki peran dalam kancah internasional, yaitu melakukan auditor di beberapa lembaga atau instansi internasional. Pada kuliah umum tersebut selanjutnya dilakukan diskusi lebih dalam dan sesi tanya jawab. ●

PPSA XXI Bahas Pentingnya Pancasila dalam Sistem Pendidikan

Persatuan Indonesia, dan sila-sila lainnya, adalah *penilaian*.

- ❑ Dikutip : “ Perbuatan mendidik ialah dengan tindakannya itu pendidikan (hendak) me-manusia-kan manusia-muda.
- ❑ Pengangkatan manusia- muda ke taraf insani; “*Pemanusiaan manusia-muda*”.
- ❑ Dalam pembahasan tentang Persatuan Indonesia yang selalu diungkapkan dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dlm “Fenomena Pendidikan”, terdapat uraian yang cukup mendasar dengan sub judul “ANAK, IBU DAN ANAK SEBAGAI BHINEKA TUNGGAL IKA”.



Peserta PPSA XXI menggelar seminar yang bertajuk “Aktualisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional”, pada Senin (24/10) di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III Lemhannas RI. Seminar yang dimoderatori oleh Aviani Malik tersebut, menghadirkan Ketua UKP-PIP Yudi Latif, M.A, Ph.D sebagai *keynote speaker*. Hadir pula Dr. (HC) Ir. H. Salahudin Wahid, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, dan Dr. J. Kristiadi sebagai pembicara dalam diskusi panel tersebut.

Ketua Seminar Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari seminar ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi yang diharapkan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan. Pada tahapan ini, para pihak yang terlibat dalam seminar dapat menampilkan analisis kondisi ideal yang diharapkan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan terhadap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kontribusinya bagi ketahanan nasional yang tangguh.

Sebagai *keynote speaker* dalam seminar, Yudi Latif mengungkapkan bahwa Pancasila menjadi pemersatu bagi keanekaragaman bangsa. Pembangunan rasa kebangsaan merupakan sesuatu yang perlu terus dirawat dan ditumbuhkan.

Pancasila harus diaktualisasikan supaya kita tidak menjadi negara yang berpura-pura Pancasila.

Selain itu, Laksma TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. dalam paparannya mengungkapkan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan sosial dan radikalisme. “Pancasila sebagai pemersatu mengalami cobaan dengan fenomena-fenomena saat ini, seperti adanya penyimpangan sosial, radikalisme, maraknya korupsi dan minimnya keteladanan. Sehingga diperlukan aktualisasi yang nyata dari nilai-nilai Pancasila khususnya dalam sistem pendidikan nasional,” ungkap Edi Sucipto.

Dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, lanjut Edi Sucipto, diyakini kelak akan menimbulkan sikap toleran dan kebhinnekaan sehingga persatuan dan kesatuan menjadi kokoh serta ketahanan nasional menjadi tangguh dalam menyikapi fenomena-fenomena tersebut.

Dalam pernyataannya mengenai fenomena yang berkaitan dengan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa Pancasila bersifat netral. Karena kenetralannya, Pancasila dapat mengakomodasi keberagaman agama. Dengan demikian, diperlukan adanya rejuvenasi Pancasila.

Kegiatan seminar dilanjutkan dengan diskusi mendalam oleh pembicara dan peserta seminar mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan tanya jawab. ●



Susi Pudjiastuti Paparkan Kinerja Tiga Tahun

Menjabat sebagai Menteri kepada Peserta PPSA XXI

Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti di tengah-tengah para peserta PPSA XXI di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (25/10) pagi, mendapat kesan berbeda. Susi Pudjiastuti hadir untuk memberikan materi seputar perkembangan kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya dalam masa jabatannya yang telah menginjak tiga tahun sebagai Menteri.

Menurutnya, perubahan yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sangat signifikan jika dilihat dari penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing. “Perubahan yang terjadi di kelautan dan perikanan barangkali hampir seperti revolusi, kalau dilihat dari situasi penangkapan ikan di Indonesia. Karena dulu lebih dari sepuluh ribu kapal asing, baik berbendera Indonesia, maupun masih berbendera negaranya, maupun tidak berbendera tapi dari luar, itu beroperasi di wilayah laut Indonesia,” ujar wanita yang juga pemilik perusahaan penerbangan Susi Air tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Susi Pudjiastuti, berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan), stok ikan di wilayah Indonesia merangkak naik dari semula 6,5 juta ton menjadi 12,54 juta ton. “Kenaikan yang luar biasa kalau kita hitung enam juta ton dari satu dolar saja itu sudah enam miliar dolar. Enam miliar dolar kalau dihitung dalam Rupiah sekitar 10 ribu triliun,” jelas Susi.

Di samping itu, nilai tukar nelayan dan nilai usaha perikanan juga mengalami kenaikan yang signifikan. “Kita juga berhasil menaikkan nilai tukar nelayan dari 104 menjadi 110. Nilai usaha perikanan juga naik dari 103 menjadi 120,” ujar Susi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Kebijakan lain yang sempat menimbulkan kontroversi dan penolakan dari komunitas nelayan yakni Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dengan peraturan tersebut, Kapal Asing dan Kapal Eks Asing dilarang

mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia.

Selain itu, Susi juga memberlakukan pelarangan *transshipment* (alih muatan di tengah laut) sejak 2014. Itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alih Muatan. “Alasan pelarangan karena Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki pelabuhan, Angkatan Laut, dan Polisi, masa *transshipment* di tengah laut diperbolehkan. Kalau mengangkut hasil tangkapan itu bukan *transshipment* namanya,” ujar Susi. Tujuan penerbitan Permen ini adalah untuk pengawasan serta pengendalian praktik *illegal fishing* yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 30 triliun per tahun.

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, seperti yang terjadi di Belitung, di mana masih sering didapati kapal-kapal asing yang dimodifikasi menjadi kapal Indonesia. Kapal-kapal tersebut menggunakan modus yang berbeda, yakni dengan memalsukan KTP awak kapal Vietnam menjadi berkewarganegaraan Indonesia. “Sekarang modus mereka berubah. Angkatan Laut di Natuna sudah menangkap kapal eks Vietnam, ketika di periksa KTP-nya sudah Indonesia namun tempat lahirnya Vietnam,” tambah Susi Pudjiastuti. Menurutnya, setelah dilakukan sensus terhadap 115 eksportir pengelolaan ikan, kerugian yang diakibatkan dari *illegal fishing* dalam sepuluh tahun (periode 2003 – 2013) mencapai miliaran dolar.

Susi Pudjiastuti tak menampik, bahwa benar di perairan Indonesia banyak kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan alias *illegal fishing*. Namun dirinya memiliki harapan besar agar kapal-kapal tersebut tidak lagi kembali ke Indonesia. “Benar banyak kapal-kapal raksasa yang melaut di laut kita, dan saya tidak ingin kapal-kapal raksasa itu melaut kembali di laut kita, karena itu akan membuat sumber daya kita tidak berkelanjutan,” tegas Susi. Wanita asal Pengandaran ini pun sempat mengutarakan harapannya kepada para peserta PPSA XXI sebagai calon-calon pimpinan nasional, agar dapat mendukung perjuangannya dalam mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. ●



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI
 Pengarah: **Arif Wachyunadi** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**
 Redaktur Pelaksana: **Wahyu Widji Pamungkas** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**
 Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitriilia**
 Desain: **Bambang Iman Aryanto** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto** Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. (021) 3832108, 3832109 Fax. (021) 3451926
 Website: <http://www.lemhannas.go.id>



Newsletter Lemhannas RI, merupakan salah satu media publikasi Lemhannas RI yang memuat berita-berita singkat mengenai berbagai kegiatan Lemhannas RI.

Newsletter yang terbit bulanan ini pertama kali terbit pada bulan Agustus 2009. Hingga kini, telah 8 tahun Newsletter menjadi alat publikasi informasi berbagai kegiatan lembaga, 100 edisi Newsletter telah menjadi media penghubung ke publik internal dan eksternal.

Dengan ke-eksistensi-an Newsletter Lemhannas RI hingga saat ini, pada bulan September lalu, Newsletter Lemhannas RI mendapatkan apresiasi dari Perpustakaan Nasional sebagai salah satu Buletin Terbaik pada Acara Penghargaan Penerbit, Majalah, Jurnal, Buletin, Buku dan *Grey Literature* di sela-sela kegiatan *International Book Fair*, Jakarta Convention Center.

edisi

100

newsletter